

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian agar penulis dapat memperbanyak pengetahuan teori yang berkaitan dengan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki judul yang sama, namun penulis mengangkat beberapa teori penelitian digunakan sebagai referensi. Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010), dengan variabel penelitian kenaikan tarif cukai, penerimaan cukai, tingkat konsumsi, pertumbuhan ekonomi serta kebijakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan pajak setiap tahunnya. Peningkatan target penerimaan cukai setiap tahun dipengaruhi oleh tingkat konsumsi, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Kedua, Marsh, dkk (2016), dengan variabel kenaikan tarif pajak dan harga eceran rokok. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dengan menggunakan sampel penelitian mengumpulkan daftar harga tiga merek rokok menggunakan tahun 2013 – 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

peningkatan harga rata – rata untuk beberapa merek rokok sebelum dan sesudah adanya pengenaan pajak rokok tidak berpengaruh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan romadhon, dkk (2016), dengan menggunakan variabel penelitian kenaikan tarif cukai, penerimaan cukai, dan pengusaha rokok di kota malang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskripif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kenaikan tarif cukai membuat berkurangnya pengusaha rokok di kota Malang dikarenakan munculnya rokok ilegal yang membuat kerugian perusahaan rokok yang aktif membayar cukai serta kampanye iklan anti merokok yang digalakkan pemerintah,

Keempat, penelitian yang dilakukan triono (2017), dengan menggunakan variabel penelitian kenaikan tarif cukai, penerimaan cukai dan produksi tembakau domestik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan kausal kenaikan tarif cukai terhadap penerimaan negara, pengusaha pabrik rokok dan produksi tembakau domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara, serta memberikan dampak negatif terhadap jumlah pengusaha pabrik rokok dan produksi tembakau domestik.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan kebijakan kenaikan tarif cukai dan penerimaan kepabeanan dan cukai pada bea cukai, namun perbedaannya terletak pada pemilihan obyek yang dikaji. Dalam penelitian ini obyek menggunakan

satu lembaga keuangan yaitu direktorat jenderal bea dan cukai kantor wilayah Jawa Timur II. Dengan menggunakan penerimaan kepabeanan dan cukai perkuartal pada laporan penerimaan kepabeanan dan cukai.

B. Kajian Pustaka

1. Kepabeanan

Kepabeanan berkaitan erat dengan bea masuk dan bea keluar, dalam bidang kepabeanan terdapat pungutan – pungutan yang sudah didasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang – undang (Purwito & Indriani, 2015: 129).

a. Bea masuk

Bea masuk adalah pungutan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bersifat memaksa terhadap kegiatan pemasukan barang ke dalam daerah pabean. Menurut (Purwito & Indriani, 2015: 106) bea masuk adalah sejumlah uang yang dipungut oleh negara terhadap orang yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dengan melalui tempat – tempat yang menjadi tempat perbatasan yang sudah ditentukan dalam perundang – undangan.

Pengawasan bea masuk ini diatur dalam perundang – undangan Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 (Purwito & Indriani, 2015: 106). Pungutan bea masuk dikenakan dengan tarif *advalorem* terhadap barang yang diimpor dengan mengestimasi nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemungutan bea masuk diberlakukan keika suatu barang yang

diproduksi tersebut dibawa oleh seseorang dengan melalui tempat – tempat yang sudah menjadi tempat perbatasan atau biasa disebut dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

Penetapan tarif bea masuk sudah diatur dalam undang – undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang besar tarif maksimum yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan bea masuk adalah dari 0% - 40%. Tarif 0% bukan berarti adanya pembebasan tarif bea masuk, namun besaran yang harus dihitung dalam perhitungan jumlah bea masuk yang harus dibayarkan (Purwito & Indriani, 2015: 69). Adanya pengenaan tarif tersebut atas pertimbangan untuk melindungi produsen domestik dan meningkatkan daya saing produk domestik terhadap barang impor. Dalam hal ini adanya produk – produk yang dikecualikan adalah sebagai berikut (Purwito & Indriani, 2015: 69)

- a. Produk pertanian tertentu, tarif bea masuknya diikat pada tingkat yang lebih tinggi dari 40%
- b. Produk impor yang dikenakan tarif berbeda yaitu:
 - Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional serta diturunkan secara bertahap atas beberapa produk tertentu. Misalnya bea masuk *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* untuk *Asean Free Trade Area (AFTA)*.
 - Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, serta kiriman melalui pos. Misalnya tarif barang – barang tersebut dikenakan dengan tarif rata – rata

- Produk impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

b. Bea keluar

Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam kegiatan pengeluaran barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Menurut (Purwito & Indriani, 2015: 121) pengawasan bea keluar ini diatur dalam undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 pada pasal 2A, dengan memiliki dasar pertimbangan bea keluar ini diberlakukan atas dasar:

- a. Peningkatan ekspor adalah suatu tujuan dan upaya pemerintah dalam memperoleh devisa. Hanya terhadap barang – barang tertentu yang dikenakan bea keluar, yaitu barang – barang yang memiliki jenis, tipe, ukuran ditentukan oleh masing – masing departemen yang terkait dengan kegiatan ekspor
- b. Pemungutan bea keluar hanya dalam keadaan tertentu, bersifat situasional, kondisional, dan jenis, tipe, ukuran dan batasan waktu
- c. Untuk melindungi kepentingan nasional
- d. Pemungutan bea keluar ini bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional.

Dalam penetapan tarif bea keluar yang sudah ditentukan dan diatur oleh perundang – undangan, serta penentuan penetapan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usul dari Menteri Perdagangan, yang dimana dapat dijelaskan sebagai berikut (Purwito & Indriani, 2015: 122):

- a. Untuk menjamin kebutuhan masyarakat dalam negeri atas barang atau komoditi yang sifat, jumlah dan jenisnya merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kelangkaan atas barang pokok tersebut dapat mengganggu kestabilan nasional dan penyimpangan perekonomian. Contohnya kebutuhan dalam negeri seperti minyak goreng, saat harga minyak goreng meningkat di pasar internasional sebagai dampak dari kenaikan permintaan.
 - b. Melindungi kelestarian sumber daya alam atas barang sifat dan jumlahnya terbatas, jika diekspor secara besar – besaran akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Misalnya kayu yang dieskpor untuk dijadikan sebagai kayu pengrajin.
 - c. Barang yang dibatasi ekspornya, karena kepentingan nasional sendiri maka perlu dipenuhi kebutuhannya. Contohnya gas alam ataupun hasil tambang.
 - d. Mengantisipasi kenaikan yang cukup drastis dari barang ekspor serta menjaga stabilitas harga barang tertentu dalam negeri.
- c. Landasan Syariah Kepabeanan

Ushr merupakan pajak atas barang dagangan yang ditanggung secara tidak langsung, serta dimana tingkatan pajak bergantung pada status pedagang yaitu status muslim, *dzimmi*, atau orang asing (Huda et al., 2015: 195). Maka dalam hal ini pungutan *ushr* merupakan suatu pungutan yang memiliki persamaan dengan pungutan modern yang dikenakan oleh bea cukai.

Menurut (Huda et al., 2015: 195) terdapat relevansi antara pungutan *ushr* dengan pungutan bea cukai modern, hal ini dapat dilihat sebagai berikut (Huda,2011):

- a. *Ushr* merupakan bentuk pajak atas barang jual beli yang dibayarkan kepada negara untuk perlindungan dan kemaslahatan umum.
- b. Pungutan *ushr* dan pungutan bea cukai merupakan pungutan secara tidak langsung karena ia dikenakan atas barang perniagaan yang dimana dibayarkan pada pos – pos yang ditunjuk langsung oleh lembaga, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana pada bea cukai saat ini.
- c. *Ushr* sama dengan pungutan bea cukai, yaitu sebagai tanda pengesahan hubungan dagang dengan dunia luar.
- d. *Ushr* menjadi sumber pemasukan kekayaan negara dan berperan dalam menutupi kebutuhan umum negara, dan penerimaan bea cukai menghasilkan sumber pemasukan yang melimpah.
- e. Bentuk pajak yang dikenakan dilihat dari agamanya, karena terdapat golongan sehingga membedakan tarif yang dikenakan. Sedangkan pungutan bea cukai merupakan pungutan yang tidak melihat dari sisi agama yang dianut pemilik barang yang dikenakan.
- f. *Ushr* ialah pajak nominal, dihitung dari ukuran kadar tertentu yaitu 200 dirham sebagai batas nominal. Berbeda dengan pungutan bea cukai yang mengambil dari dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain. adanya persamaan dan perbedaan tersebut terdapat

surah yang mengatur diperbolehkannya penerimaan yang dihimpun lembaga bea cukai dalam ayat Al-quran Surah Al – Baqarah [2]: 177:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Surah al baqarah : 177 bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat tersebut kebijakan yang salah satunya mengarah memberikan sebagian harta ke 5 golongan yang disebutkan. Hal ini selain diperintahkan untuk zakat namun juga tambahan penerimaan pajak orang – orang kaya atau kelompok yang memproduksi barang – barang dan memiliki penghasilan yang besar. Dalam penerimaan pajak yang dikenakan seperti barang – barang mewah ataupun barang barang yang bukan merupakan kebutuhan sehari – hari dimiliki sebagian masyarakat yang berpendapatan tinggi ataupun bisa dikatakan mampu.

Dari penerimaan pajak tersebut maka akan membantu pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan pajak pula maka akan terjadi pemerataan pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan serta bisa membantu masyarakat secara luas.

2. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dibebankan terhadap pemakai/pengguna barang kena cukai, bersifat selektif serta perluasan pengenaan atas barang kena cukai didasarkan atas sifat dan karakteristik objek cukai. Pengenaan ini juga berlaku terhadap barang kena cukai yang dimpor, dikenakan atas barang – barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kestabilan ketertiban dan keamanan negara, distorsi perekonomian, dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi (Purwito & Indriani, 2015: 122). Sedangkan menurut (Romadhon, Masgirang, Mochammad Al Musadieq, 2016: 4) cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

a Karakteristik Pengenaan Cukai

Karakteristik dasar pengenaan cukai. Pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Triono, 2017: 126). Sedangkan menurut (Sri Rahayu, 2010: 78) bahwa sifat eksklusif yang melekat pada cukai terlihat tiga

karakteristik *pertama*, selectivity di dalam coverage adalah cukai dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu dan setiap barang yang wajib cukai diatur secara individu di dalam undang – undang. *Kedua*, aneka ragam argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai. *Ketiga*, cukai secara implisit mengisyaratkan perlunya bentuk kontrol yang lebih bersifat fisik dalam rangka penentuan *excise liability* dan untuk meyakinkan bahwa implementasi aspek yuridis dengan totalitas perangkat peraturan perundang – undangan dapat terlaksana. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa cukai merupakan suatu barang yang konsumsinya harus dikendalikan ataupun diawasi, karena barang tersebut memiliki ciri – ciri yang khusus serta memberikan dampak baik kepada konsumennya maupun orang lain. Menurut (Surono, 2013: 18) pungutan cukai diatur dalam pasal 2 undang – undang cukai, sebagai berikut:

- Konsumsinya perlu dikendalikan;

Adanya konsumsi yang perlu dikendalikan artinya pemerintah membatasi peredarannya, hal ini agar masyarakat tidak mengonsumsi barang tersebut secara berlebihan, serta alasan karena kesehatan maupun sumber daya yang terbatas. Pungutan cukai digunakan sebagai instrumen fiskal yang akan membatasi konsumsi terhadap barang yang dapat merusak kesehatan masyarakat. Adapun dalam buku (Surono, 2013: 19) beberapa hal yang direkomendasikan oleh *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) sebagai upaya pengendalian rokok dunia sebagai berikut:

1) Penerapan pajak yang tinggi dengan tujuan kesehatan. Di Indonesia pemerintah bisa menerapkan pungutan cukai dengan tarif maksimal sebesar 57% dari harga jual eceran atau 275% dari harga jual pabrik.

2) Pelarangan penjualan produk tembakau dibawah umur dampak negatif mengkonsumsi produk hasil tembakau menimbulkan penyakit jantung, stroke, hipertensi, kanker paru – paru dan lain – lain. Pemerintah Indonesia peduli dengan dampak negatif tersebut dengan membentuk Peraturan Pemerintah nomor No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

3) Pelarangan penjualan produk hasil tembakau dalam bentuk batangan atau dalam jumlah kecil, faktor meningkatnya jumlah konsumen rokok karena ketika konsumen diberi kemudahan dalam mengakses / mendapatkan produk tersebut. Apabila penjualan eceran dilakukan maka harga yang dijual semakin mudah atau harganya yang bisa dijangkau oleh seseorang, hal ini akan memberikan dampak semakin meningkatnya jumlah konsumsi produk hasil tembakau.

- Peredarannya perlu diawasi;

Obyek pungutan cukai yang dikenakan pemerintah adalah yang dapat memeberikan dampak kepada masyarakat, sehingga diperlukannya pembatasan dan pengawasan dalam peredarannya. Pungutan cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang – barang yang meliputi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Etil Alkohol, Cukai hasil tembakau (CHT). Tujuan utama pungutan ini adalah agar tidak menimbulkan gangguan

pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada produk MMEA menimbulkan dampak pada masyarakat seperti keresahan masyarakat. Menurut (Surono, 2013 : 20) bentuk pengawasan yang diberikan pada produk MMEA dan Etil alkohol yaitu:

- 1) Pada tingkat distributor dan pengecer diharuskan memiliki ijin di bi dang cukai atau disebut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- 2) Pengangkutan BKC etil alkohol dan MMEA meskipun sudah dilunasi cukainya wajib dilindungi dokumennya,

Sedangkan pada produk Cukai Hasil Tembakau (CHT) alasan pengenaannya pada karakteristiknya yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bentuk pengawasan dari pemerintah menandai dengan cara pelekatan pita cukai.

- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

Pungutan cukai hanya memungut barang – barang yang memiliki karakteristik tertentu, serta bertujuan untuk membatasi barang – barang yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pungutan cukai sebagai alat fiskal yang memberikan beban kepada pihak – pihak yang menggunakan barang tersebut yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.

- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Berdasarkan pasal 2 undang – undang cukai , menurut pengertian karakteristik cukai menjadi acuan bahwa cukai sebagai alat fiskal yang dikategorikan sebagai barang mewah atau barang yang memiliki nilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok. Tujuan pokoknya adalah memberikan keseimbangan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.

a. Barang Kena Cukai

Menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 UU Cukai pungutan dilakukan pemerintah terdiri atas 3 jenis yaitu Etik Alkohol, Minuman Mengandung Etik Alkohol (MMEA), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dijelaskan sebagai berikut:

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Etil alkohol atau edanol berupa barang cair, jernih, dan tidak berwarna.

Dalam etil alkohol biasanya sebagai bahan penolong atau bahan yang digunakan untuk keperluan farmasi, produk *sanitary*, bahan campuran cat, *fartumery*. Etil alkohol diperoleh dengan cara fermentasi dan memiliki kadar alkohol yang relatif rendah.

b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. MMEA merupakan

barang cair yang siap untuk diminum oleh konsumennya yang dihasilkan dengan cara peragian ataupun penyulingan.

c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Hasil tembakau terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris (Tis), dan hasil tembakau lainnya. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan dibalut dengan kertas dengan cara diklenting, untuk dipakai dan tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terbagi menjadi 3 yaitu sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret klembak menyan (Surono, 2013: 38).

- Sigaret kretek

Sigaret kretek adalah sigaret yang proses pembuatannya dicampur dengan cengkehbaik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Dalam proses pembuatannya sigaret kretek terbagi menjadi 2 yaitu sigaret kretek tangan (SKT) adalah proses pembuatannya yang dimulai dengan pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin, dan sigaret kretek mesin (SKM) adalah proses pembuatannya dari keseluruhan menggunakan bantuan mesin (Surono, 2013: 38).

- Sigaret putih

Sigaret putih adalah sigaret yang proses pembuatannya tanpa menggunakan cengkeh, kelembak, atau kelembak menyan. Dalam proses pembuatannya sigaret putih dapat dilakukn secara manual (sigaret Putih Tangan / SPT) ataupun menggunakan bantuan mesin (Sigaret Putih Mesin / SPM).

- Sigaret klembak menyan

Sigaret yang dalam pembuatannya dicampuri dengan kelembak ataupun kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Cerutu adalah hasil tembakau yang diberikan dari lembaran – lembaran daun tembakau, diiris atau tidak, dengan cara digulung untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), dengan cara diklenting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Tembakau iris (Tis) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau, dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya (Surono, 2013: 39).

Sehingga subyek yang menjadi sasaran pemerintah dalam hal ini adalah pengusaha pabrik yang memproduksi atau mengimpor barang – barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang sudah diatur dalam perundang – undangan. Dari beberapa obyek yang sudah ditentukan merupakan barang yang memiliki dampak yang lebih besar dalam mengkonsumsinya serta dapat membahayakan bagi beberapa aspek lingkungan maupun kesehatan. Maka

pemerintah membatasi serta mengontrol atau mengawasi barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Dengan diberlakukan Tarif cukai yang sudah ditentukan dalam peraturan undang – undang maupun peraturan menteri keuangan.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah mengenai cukai sudah diatur menurut undang – undang maupun peraturan menteri keuangan. Fungsi dan Tujuan Pengenaan Cukai. Cukai merupakan salah satu pungutan yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat serta memiliki peranan yang cukup besar bagi sumber penerimaan negara. Tujuan dalam pengenaan ini karena adanya sifat diskriminatif atau pemilihan yang selektif terhadap obyek yang dikenakan pungutan cukai tersebut (Surono, 2013:13). Pungutan ini memiliki kontribusi bagi negara dalam aspek pembangunan negara, yaitu terdiri dari fungsi budgetair pemerintah dan fungsi regulierend. Menurut (Surono, 2013:13) fungsi cukai sebagai alat budgetair dan sebagai alat regulierend:

- Fungsi Budgetair

Cukai adalah salah satu jenis pungutan yang memiliki peranan penting dalam sumber penerimaan negara. Dalam susunan penerimaan APBN, termasuk dalam penerimaan pajak dalam negeri bersama – sama dengan penerimaan pajak lainnya. Pengelolaan fiskal ini dikaitkan oleh lembaga direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC). Jenis pungutan yang dihimpun oleh DJBC adalah pungutan bea masuk, bea keluar dan cukai. Dalam 3 dana

yang dihimpun tersebut yang memiliki pendapatan besar dan mengalami kenaikan serta diatas target adalah penerimaan cukai.

- Fungsi Regulerend

Selain untuk pengumpulan penerimaan negara, fungsi kedua adalah sebagai alat kontrol pemerintah terhadap pola konsumsi masyarakat terhadap barang kena cukai. Kebijakan pemerintah terhadap pungutan cukai tidak hanya ditujukan untuk pengoptimalan penerimaan negara, tetapi pemerintah juga memiliki tujuan – tujuan lainnya seperti kesehatan masyarakat dan pengendalian dampak sosial.

3. Tarif Cukai

Tarif yang dikenakan pada barang – barang termasuk cukai, pemerintah memiliki tujuan dari tarif cukai diantaranya secara ekonomi dan secara sosial, Secara ekonomi pemerintah berupaya menyelamatkan kesejahteraan ekonomi warganya. Dengan tarif cukai yang semakin tinggi diharapkan perokok aktif akan mengurangi konsumsi rokok. Berkurangnya uang untuk membeli rokok menjadi peluang keluarga untuk berbelanja barang-barang lain yang lebih bermanfaat, terutama untuk peningkatan kesehatan. Secara sosial pemerintah melalui instrumen tarif cukai berupaya menyelamatkan bangsa dari penurunan derajat kesehatan akibat paparan asap rokok. Dengan adanya kenaikan tarif rokok maka perokok aktif diharapkan akan mengurangi konsumsi rokok implikasinya derajat kesehatan akan membaik sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja (Ferizal, 2016: 58). Dalam buku (Surono, 2013 : 40)

berdasarkan pasal 5 ayat (3) undang – undang cukai, sistem tarif cukai yang dapat dikenakan terhadap BKC dibedakan 2 jenis yaitu:

a. Tarif Advalorem

Merupakan tarif yang dimana pungutan cukainya didasarkan pada persentase tertentu yang dikalikan dengan harga dasar.

b. Tarif Spesifik

Tarif spesifik merupakan tarif yang dimana pungutan cukai dikalikan tarif dalam bentuk rupiah kemudian dikalikan dengan jumlah spesifik rokok dalam satuan batang.

Dengan adanya pengenaan tarif cukai yang diberlakukan maka terdapat tujuan namun juga terdapat beberapa dampak yang diberikan baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat akan mengurangi daya beli rokok dikarenakan harganya yang semakin mahal, memberikan pengaruh penerimaan negara serta dapat meningkatnya taraf kesehatan masyarakat dan lingkungan sedangkan dampak negatifnya adalah banyaknya pengangguran yang diakibatkan oleh perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja dikarenakan semakin mahalnya pengenaan pajak terhadap barang yang diproduksi, banyaknya perusahaan kecil produksi rokok jenis lain yang tutup atau tidak dapat mempertahankan usahanya akibatnya akan berdampak pada penerimaan negara berupa pajak cukai. Cukai dapat diperhitungkan berdasarkan atas perkalian dari jumlah lembar pita yang dipesan, seri pita yang dipesan

pengusaha, jumlah batang rokok setiap bungkus serta tarif cukai untuk masing – masing jenis hasil tembakau. Dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Perhitungan Cukai} = \text{Jumlah Batang} \times \text{Tarif Cukai}$$

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

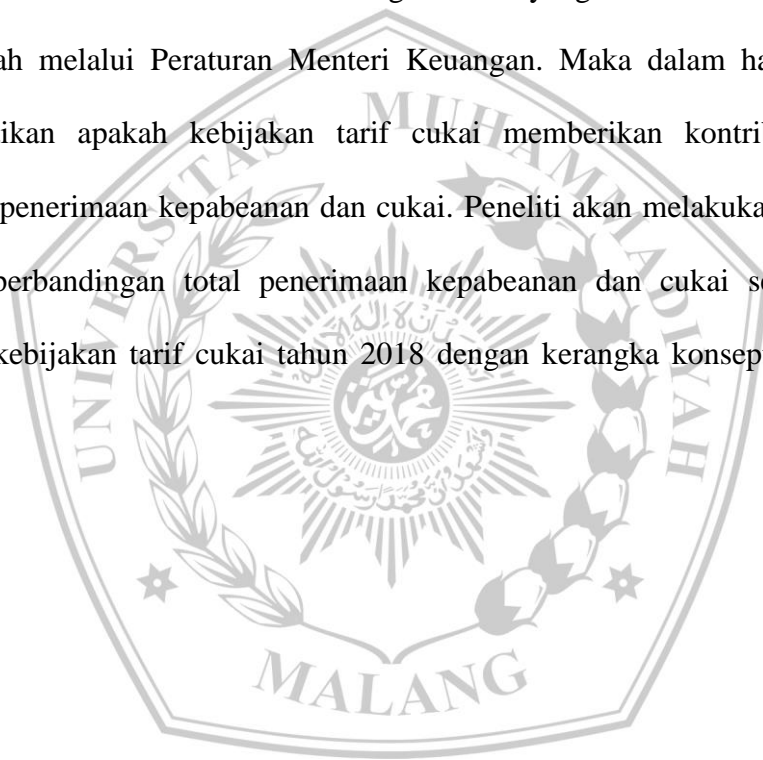
Bea cukai adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani di bidang kepabeanan dan cukai. Bea cukai biasa disebut dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Lembaga DJBC dipimpin oleh direktur jenderal yang dibawah langsung oleh kementerian keuangan Republik Indonesia. Lembaga DJBC memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Menurut (Sri Rahayu, 2010: 77) tugas dan fungsi lembaga DJBC yaitu mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA), etil alkohol (EA), dan cukai hasil tembakau (CHT). Seiring dengan perkembangan, bea cukai memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai *trade fasilitator* atau fasilitas perdagangan, *industrial assistance* atau dukungan untuk industri dalam negeri, *revenue collector* atau pemungutan penerimaan negara, dan *community protector* atau untuk perlindungan masyarakat.

5. Kerangka Berpikir

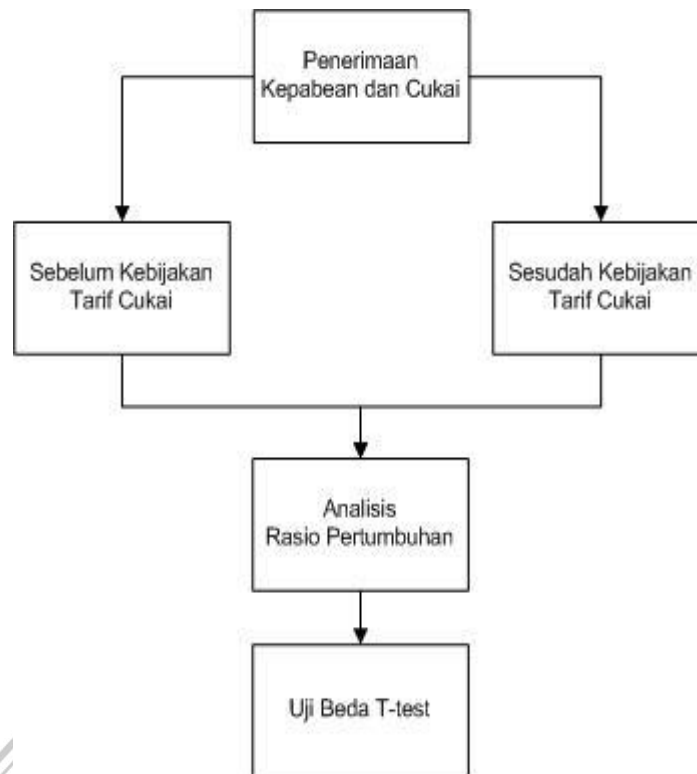
Bea dan cukai tergolong lembaga yang ditugaskan pemerintah, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik, mengingat pemerintah menargetkan perolehan uang baik dari dalam maupun luar.

Target penerimaan kepabeanan dan cukai sangat berdampak bagi pendapatan negara serta bagi masyarakat. Kebijakan tarif cukai dapat memberikan kontribusi yang besar bagi keuangan pemerintah seperti penerimaan negara tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian (Romadhon, Masgirang, Mochammad Al Musadieq, 2016) bahwa penerimaan CHT dipengaruhi oleh jumlah industri rokok, yang dimana nantinya hasil produksi dari industri tersebut dikenakan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan. Maka dalam hal ini untuk membuktikan apakah kebijakan tarif cukai memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai. Peneliti akan melakukan penelitian tentang perbandingan total penerimaan kepabeanan dan cukai sebelum dan sesudah kebijakan tarif cukai tahun 2018 dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1

**Kerangka Berpikir Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Sebelum dan
Sesudah Kebijakan Tarif Cukai**



6. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2013: 59). Maka dalam hal ini hipotesis merupakan suatu pernyataan yang diberikan peneliti yang bersifat sementara, dalam hipotesis ini untuk mengumpulkan data yang diinginkan peneliti sehingga data tersebut dapat menolak atau justru mendukung pernyataan yang diberikan peneliti tersebut.

Hipotesis yang dibangun peneliti pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan pertimbangan atas penelitian terdahulu adalah sebagaimana berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan signifikan jumlah penerimaan kepabeaan dan cukai sebelum dan sesudah kebijakan tarif cukai.

H_a: Terdapat perbedaan signifikan jumlah penerimaan kepabeaan dan cukai sebelum dan sesudah kebijakan tarif cukai.